

Peristiwa Malari dan Dampaknya terhadap Gerakan Mahasiswa Indonesia (1974-1998)

Anggun Dewi Fathonah^{1*}, Sutiya, Tri Yuniyanto²

¹Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²*anggundewif@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 25, 2024

Revised August 24, 2024

Accepted December 27 2024

Available online December 30, 2024

Keywords:

Student movement; riots; new order



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Sebelas Maret.

ABSTRACT

This research aims to describe the Impact of The Malari Incident on The Indonesian student political movement (1974-1998). This research uses historical methods. Data used in this research are contemporary newspapers, books, and journals with related topics which collected through documentation and literature studies technique. Data analysis techniques conducted through interpretation process with the help of sociology and political science approaches. Based on the results of this research, it can be concluded that: (1) The Malary Incident 1974 occurred due to escalation of problems that causes domestic political upheaval in early 1970s, such the dominance of foreign capital, dualism of state institutions and internal divisions, the TMII project and marriage draft law issues, also portrait of social inequality in Anti Chinese Incident. That political upheaval causes Indonesian student criticize the government through discussions and demonstrations. But that event on January 15th, 1974 leads to riots due to involvement of irresponsible peoples that take advantage from this situation, so the students become the most wronged party because they have to bear the consequences of something they didn't do. (3) To avoid similar incidents, the government issued a series of policies that limit student movements. Students are prohibited to plunge in political activity such as criticizing the government through a potential to disrupt political stability. The exception of the policies was done gradually and indirectly changed the student movement over the past few years. This situation lasted until 1998 and ended up with the collapse of the New Order power in the hands of President Soeharto.

1. PENDAHULUAN

Mahasiswa memiliki kedudukan yang istimewa dalam pandangan masyarakat, yakni sebagai golongan yang memperoleh pendidikan modern dan memiliki peran sebagai *agent of change* yang mampu membawa masyarakat pada perubahan menuju arah yang lebih baik (Martadinata, 2019). Sebagai generasi penerus bangsa, mereka juga memiliki kedudukan vital dalam dinamika sosial politik dalam negeri karena lahirnya gerakan mereka merupakan reaksi terhadap perkembangan politik yang sedang berjalan dan dampaknya mampu mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat di kemudian hari. Sehingga wajar apabila mahasiswa sering menjadi tumpuan masyarakat untuk mengatasi masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti menentang ketidakadilan dan mengoreksi kegagalan lembaga politik.

Sederet permasalahan yang tak kunjung menemui penyelesaian baik itu menyangkut aspek sosial, ekonomi, maupun politik mengindikasikan bahwa lembaga politik yang ada di tengah masyarakat belum berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Masalah-masalah itu menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik seiring dengan banyaknya masalah yang menumpuk, tidak terselesaikan, hingga akhirnya masyarakat merasa terbebani. Mereka merasa perlu adanya alternatif lain untuk menjalankan fungsi lembaga politik khususnya untuk mewujudkan perubahan menuju cita-cita milik bersama (Kusumah, 2007). Harapan tersebut kemudian jatuh pada mahasiswa yang dinilai "bersih" dan obyektif dalam memandang suatu masalah. Senjata yang diperlukan masyarakat untuk menyuarakan keresahan dan keinginan mereka seperti petisi, demonstrasi, dan aksi massa juga dapat ditemukan dalam gerakan mahasiswa.

Kemunculan gerakan mahasiswa dalam memantik perubahan sosial maupun politik tidak perlu diragukan lagi, sebab meskipun berada di luar lingkaran kekuasaan gerakan mereka berhasil membawa pengaruh yang amat besar. Hal ini merupakan fenomena menarik yang memperlihatkan bahwa aktivitas politik masih berjalan di kalangan intelektual (Maiwan, 2014). Adanya dukungan penuh dari masyarakat terhadap gerakan mahasiswa juga membuat pemerintah sebagai lembaga politik sulit menghentikan laju pergerakan dan dampak yang ditimbulkan. Sehingga pemerintah sering kali memberi respons yang cenderung represif dalam menyikapi gerakan mereka dengan berbagai tindakan seperti tekanan fisik, pengawasan dan pengendalian, atau bahkan menempuh jalur hukum sebagai penyelesaiannya. Usaha represi yang dilakukan merupakan langkah untuk meredam gejolak yang terlanjur mencuat ke permukaan dan menghambat gerakan mahasiswa agar tidak menjadi ancaman potensial bagi rezim pemerintahan (Wirajati, 2018). Fenomena semacam ini dapat dijumpai dalam sistem politik Indonesia pada era orde baru yang berada di bawah pemerintahan Presiden Soeharto dan bermula dari sebuah tragedi yang dikenal dengan Peristiwa Malari 1974.

Peristiwa Malari 1974 merupakan titik tolak ketidakpuasan rakyat terhadap berbagai kebijakan pemerintah, terutama terkait strategi pembangunan yang mengandalkan bantuan asing hingga semakin mendominasi perekonomian dalam negeri. Gerakan mahasiswa pada pertengahan Januari 1974 itu berakhir dengan kerusuhan karena adanya provokasi dan intervensi dari oknum tak bertanggung jawab. Akibat dari peristiwa ini, pemerintah menjadi semakin represif dan otoriter dalam menyikapi gerakan sejenis. Hal tersebut terbukti dari adanya kebijakan-kebijakan terkait kemahasiswaan yang semakin ketat dan mengikat hingga mahasiswa semakin sulit untuk melakukan aktivitas yang terkait dengan ranah politik (Rustamana, dkk, 2024).

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dalam artikel ini akan menjawab tiga pertanyaan, yaitu (1) Bagaimana latar belakang terjadinya Peristiwa Malari 1974?, (2) Bagaimana kronologi terjadinya Peristiwa Malari 1974?, (3) Bagaimana dampak terjadinya Peristiwa Malari 1974 terhadap gerakan politik mahasiswa (1974-1998)?.

2. KAJIAN TEORI

Penelitian ini membutuhkan bantuan kajian teori untuk menganalisis Peristiwa Malari 1974 beserta dampaknya terhadap gerakan mahasiswa Indonesia pada masa orde baru. Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

2.1. Gerakan Sosial

Gerakan sosial merujuk kepada seperangkat keyakinan dan tindakan yang tak terlembaga dan dilakukan oleh sekelompok orang untuk mendukung ataupun menghambat terjadinya perubahan dalam masyarakat (Mirsal, 2001). Gerakan sosial merupakan gerakan terorganisir yang dilakukan oleh sejumlah orang dengan tujuan untuk mengubah atau mempertahankan unsur tertentu dalam masyarakat luas. Adapun ciri gerakan sosial yakni adanya tujuan yang hendak dicapai, gerakan yang terencana, serta terdapat unsur ideologi di dalamnya (Cohen, 1992). Gerakan sosial merupakan perlawanan politik, yakni tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan para penguasa (Tarrow, 2011).

Gerakan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini lebih mengarah kepada gerakan sosial dengan dimensi politik yang dominan. Gerakan seperti ini umumnya disebut sebagai gerakan politik dan biasanya ditujukan kepada kaum penguasa yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu kebijakan, misalnya institusi pemerintahan formal (Burstein, 1995).

Konsep gerakan politik dapat dipahami dari pendapat tokoh sosiologi yang menggunakan istilah "politik" dalam menjelaskan gerakan sosial. Sidney Tarrow menjelaskan tentang fenomena gerakan sosial melalui kerangka teoritis yang lebih luas dan mencoba menghubungkan keterkaitan antara gerakan sosial dengan politik sehingga mampu memberi gambaran tentang konsep gerakan politik.

Menurut Tarrow gerakan sosial bermula dari tindakan kolektif yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu oleh mereka yang tidak memiliki akses terhadap institusi pemerintahan dengan mengajukan klaim baru atau klaim yang tidak diterima oleh mereka yang berkuasa. Hal tersebut lantas berkembang menjadi pertentangan politik antara masyarakat biasa dengan elite penguasa. Pertentangan politik dipicu oleh adanya kesempatan perubahan disertai dengan ketegangan situasi yang melibatkan masyarakat dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Hal tersebut mendorong masyarakat awam yang tidak memiliki sumber daya untuk mengambil tindakan. Tindakan seperti itu apabila didukung dengan jaringan sosial yang terstruktur dan terus dipelihara dalam bingkai tindakan kolektif, berpotensi menciptakan interaksi yang berkelanjutan antara pihak yang saling bertentangan dan terjadilah gerakan politik (Tarrow, 2011). Gerakan itu bisa terbentuk baik dari isu tunggal maupun gabungan dari beberapa isu yang telah menjadi keresahan suatu kelompok sosial (Yacob, 2019). Keresahan tersebut dijadikan sebagai klaim milik bersama untuk menuntut adanya perubahan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan gerakan (Johnston, 2014).

Menurut Kusumah (2007) gerakan politik dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, gerakan politik nilai atau (*value political movement*), merupakan gerakan politik yang berorientasi pada terciptanya nilai-nilai ideal kebenaran, keadilan, kemanusiaan, profesionalitas dan intelektualitas dalam segala aspek pengelolaan negara. Kedua, gerakan politik kekuasaan atau (*power political movement*), yaitu gerakan politik untuk memperoleh kekuasaan dalam lembaga politik seperti yang dilakukan oleh partai politik.

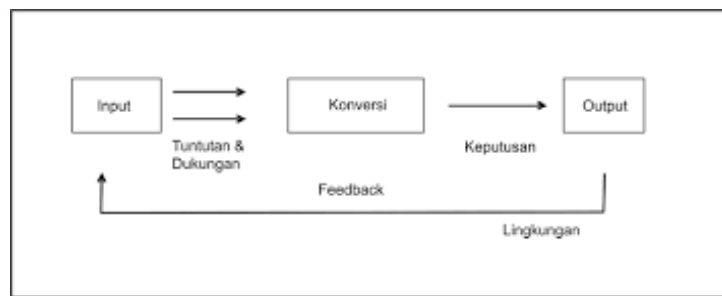
2.1.1 Gerakan Mahasiswa Sebagai Gerakan Sosial Politik

Menurut Albatch (1989) gerakan mahasiswa di negara-negara dunia ketiga memiliki dua fungsi, yakni untuk menumbuhkan perubahan sosial dan mendorong perubahan politik. Kemunculan gerakan mereka dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti situasi sosial ekonomi yang memprihatinkan, ketidakadilan sosial, kebijakan luar negeri pemerintah yang tidak adil, ketidakpuasan terhadap pemerintah dan penguasa, serta politik yang dirasa tak lagi demokratis (Sanit dalam Albatch, 1998). Faktor-faktor tersebut apabila dibarengi dengan titik puncak ketidakpuasan mahasiswa dan keresahan di tengah-tengah masyarakat, maka gerakan mahasiswa akan tampil sebagai *pressure group* atau kelompok penekan dalam sistem politik.

Menurut Husin (2014) terdapat tiga ciri kelompok penekan, yakni melakukan aktivitas politik di luar rezim pemerintahan, menyuarakan kepentingannya dengan melakukan tekanan terhadap rezim pemerintahan untuk mempengaruhi kebijakan publik, serta tidak berorientasi untuk memperoleh jabatan dalam pemerintahan selaku sistem politik formal melainkan berorientasi pada perubahan baik secara sosial maupun politik. Mulanya dalam aspek sosial gerakan mahasiswa akan membangun basis dan wacana di sosial masyarakat, menerjemahkan permasalahan yang timbul, kemudian turut serta dalam merumuskan solusi permasalahan tersebut. Oleh karena itu gerakan mahasiswa harus memasuki ranah politik sebagai gerakan politik nilai dengan melakukan tekanan terhadap perumus kebijakan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama, yakni perubahan ke arah yang lebih baik (Husin, 2014).

2.2 Sistem Politik

Kantaprawira (1988) menjelaskan bahwa sistem politik merupakan mekanisme seperangkat peranan dalam struktur politik yang terhubung satu sama lain serta menunjukkan adanya proses yang langgeng. Menurutnya David Easton, sistem politik merupakan sistem yang komponen-komponen penyusunnya bekerja untuk mengalokasikan nilai dengan sifat pengalokasian yang otoritatif atau mengikat masyarakat



Gambar Skema Sistem Politik David Easton

Teori yang digagas oleh David Easton menjelaskan proses yang terjadi dalam sistem politik. Diibaratkan sebagai masukan atau sumber energi bagi sistem politik yang dapat berupa tuntutan serta dukungan (Anggara 2013: 15). Tuntutan yang menjadi masukan dapat dipengaruhi oleh lingkungan baik internal maupun eksternal. Tuntutan juga dapat berkenaan dengan beberapa hal, seperti barang dan pelayanan, regulasi, maupun partisipasi dalam sistem politik. Hal yang perlu diperhatikan agar tuntutan benar-benar sampai dan masuk dalam sistem politik ialah cara penyampaian serta peranan agen yang mengkomunikasikan tuntutan tersebut. Tuntutan yang telah mendapat respons kemudian menjadi bahan garapan oleh pemeran dalam sistem politik yang bersiap untuk menentukan masalah apa yang penting untuk diperhatikan dan dijadikan sebagai topik diskusi. Di sisi lain, dukungan merupakan orientasi untuk mempertahankan maupun menolak sistem politik, sehingga dukungan dapat bersifat positif maupun negatif. Dukungan muncul dari adanya konflik dan ancaman serta dapat didasari atas ideologi, budaya, maupun nasionalisme (Easton, 1957).

Tuntutan beserta dukungan yang menjadi input dan diproses dalam sistem politik, hasil keluarannya disebut dengan output yang dapat berupa dua entitas, yakni keputusan dan tindakan. Hasil keluaran tersebut kemudian menerima *feedback* atau umpan balik dari lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Reaksi dari adanya umpan balik tersebut selanjutnya diterjemahkan kembali dalam bentuk tuntutan dan dukungan seperti input awal. Proses seperti ini menjadi siklus yang berulang selama sistem politik masih eksis (Anggara, 2013: 17).

Kinerja sistem politik menurut David Easton ini meskipun abstrak dan luas tetapi telah diakui unggul dalam cakupannya oleh banyak ahli. Hal tersebut didasari oleh kemampuan teori Easton dalam menggambarkan kinerja sistem politik secara holistik. Pengakuan tersebut menjadi alasan bahwa teori sistem politik Easton sering disebut sebagai *grand theory* (Anggara, 2013: 10).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlangsung selama tujuh bulan, terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juli 2024 dan dilakukan di beberapa tempat seperti Monumen Pers Nasional, Jogja Library Center, Perpustakaan Universitas Sebelas Maret, serta Perpustakaan Universitas Gajah Mada. Metode penelitian menggunakan metode sejarah yang dibantu dengan pendekatan ilmu sosial dan ilmu politik untuk memahami dan menganalisis peristiwa sejarah dari sudut pandang yang berkaitan. Sumber data yang digunakan berupa surat kabar yang sezaman dengan peristiwa sejarah yang dikaji dalam penelitian ini, dilengkapi dengan buku dan jurnal yang membahas peristiwa terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dan studi pustaka. Data yang telah terkumpul kemudian disortir melalui kritik sumber untuk memastikan data tersebut otentik dan kredibel. Berikutnya data yang lolos diinterpretasi dengan analisis dan sintesis. Setelah melalui serangkaian proses yang panjang, hasil penelitian disajikan melalui historiografi untuk menyatukan hasil penelitian secara utuh dan menyeluruh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Latar Belakang Terjadinya Peristiwa Malari 1974

4.1.1 Bantuan Asing dan Dominasi Jepang

Pada masa awal orde baru, pemerintah harus menangani masalah perekonomian negara seperti inflasi mencapai 500%, defisit anggaran belanja negara mencapai 300% dari pemasukan, serta hutang luar negeri yang kian menumpuk mencapai 2358 juta USD (Yogaswara, 2009; Fatah, 2010). Sebagai upaya untuk menangani masalah-masalah itu pemerintah mulai mengambil beberapa tindakan untuk melakukan penyelamatan ekonomi.

Tindakan pemerintah itu terwujud melalui kebijakan Penanaman Modal Asing yang dilegalkan pada 10 Januari 1967. Kebijakan ini mendapat sambutan baik dari berbagai negara. Sejak tahun 1967 hingga 1970, tercatat sejumlah 22 negara telah menginvestasikan modalnya di Indonesia. Salah satunya ialah Jepang dengan nilai investasi mencapai US\$ 467,7 juta untuk 119 proyek pada pertengahan tahun 1973 (Agustina, 2014). Pelaksanaan kerja sama antara Indonesia-Jepang tidak berjalan mulus karena pemerintah hanya menyeleksi permohonan calon investor tanpa adanya pengawasan lebih lanjut. Keinginan Jepang untuk membantu Indonesia dengan cara berinvestasi ternyata hanya didasari oleh kepentingan Jepang sendiri. Hal ini nampak pada syarat yang diajukan oleh Jepang untuk bersedia melakukan investasi di Indonesia, yaitu hasil investasi harus digunakan untuk membeli hasil produksi negara investor (Rizki, 2013). Syarat tersebut berimbang pada persaingan tidak sehat antara pengusaha asing dengan pengusaha pribumi.

Selain kebijakan PMA, Indonesia juga mendapat bantuan dari negara kapitalis yang bersedia membiayai program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Beberapa negara tersebut ialah Australia, Amerika Serikat, Belgia, Inggris, Kanada, Swiss, Denmark, Prancis, Italia, Jepang, Selandia Baru, dan Jerman Barat yang kemudian dikenal sebagai *Inter Governmental Group on Indonesia* (IGGI). Melalui forum IGGI, Indonesia mendapat bantuan dari beberapa negara yang bersedia meminjamkan sejumlah dana dengan syarat yang bermacam-macam. Adanya kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak justru membuat Indonesia dengan mudah dikendalikan oleh negara dengan jumlah bantuan yang cukup besar seperti Amerika Serikat dan Jepang, terutama dalam hal merumuskan kebijakan baik dalam ranah ekonomi maupun politik (Harthanti dan Nuryana, 2018).

Secara umum keterbukaan pemerintah Indonesia terhadap bantuan dan modal asing memang menunjukkan perkembangan perekonomian dalam negeri seperti inflasi yang semakin menurun dan meningkatnya pendapatan negara. Namun rupanya muncul persoalan lain yang kelak menjadi bom waktu bagi pemerintah orde baru. Dalam pandangan mahasiswa, keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nyatanya tidak diimbangi pemerataan. Pemerintah terlalu mengejar keuntungan dan pertumbuhan tanpa memperhatikan aspek sosial, sehingga distribusi ekonomi dan pendapatan menjadi terabaikan. Menurut mereka langkah pemerintah untuk membuka pintu terlalu lebar bagi modal asing dianggap membahayakan karena yang menerima keuntungan dari sistem tersebut hanyalah mereka yang sudah siap. Sedang mereka yang sudah siap hanya segelintir orang, sehingga hanya kelompok tertentu yang menguasai perekonomian. Hal inilah yang menyulut aksi protes mahasiswa Indonesia pada awal tahun 1970 an (Siregar, 2003).

4.1.2. Dualisme Lembaga Negara dan Perpecahan Internal Pemerintahan

Selain menunjuk tim teknokrat untuk melakukan penyelamatan ekonomi, Presiden Soeharto juga membentuk tiga Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk memperkuat sektor politik dan militer pemerintahan. Ketiga lembaga tersebut memiliki akses langsung terhadap presiden, di antaranya yaitu Asisten Pribadi (Aspri), Operasi Khusus (Opsus), dan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) (Lailah dkk, 2018). Aspri merupakan lembaga non departemen berisikan orang-orang militer kepercayaan Presiden Soeharto yang bertugas menjadi penasihat pribadi beliau. Dua orang Aspri yang paling menonjol ialah Ali Moertopo sebagai penasihat bidang politik, dan Soedjono Hoemardani yang lebih mengarah kepada bidang ekonomi serta hal-hal yang sifatnya irasional. Selain menjadi bagian dari Aspri, Ali Moertopo juga mendapat tugas sebagai kepala Opsus (Zulkifli dan Agustina, 2013). Di bawah kendali Ali Moertopo, Opsus menjadi organisasi intelijen partikelir yang mengambil alih fungsi Badan Koordinasi Intelijen (Bakin) yang sudah lebih dulu dibentuk dan dikepalai Jenderal Sutopo Juwono. Sebagai Aspri yang menyangkut bidang ekonomi, Soedjono Hoemardani menjadi penghubung antara

Indonesia dengan negara-negara lain yang bersedia membantu pembiayaan program pembangunan. Di sisi lain tim teknokrat pun sudah dibentuk untuk melaksanakan tugas serupa, tetapi kedekatan Soedjono dengan Presiden Soeharto menjadikannya lebih leluasa dalam bertindak. Hal ini menyebabkan kinerja tim teknokrat menjadi tersendat karena Soedjono selalu selangkah lebih jauh dalam hal pengambilan keputusan.

Kedudukan Ali dan Soedjono dalam Aspri dan Opsus menjadikan kekuasaannya semakin tak terbatas. Pengaruhnya terhadap keputusan dan tindakan Presiden Soeharto telah melampaui kabinet dan lembaga-lembaga resmi pemerintahan. Manuver politik yang dilakukan keduanya lantas menimbulkan perasaan tidak nyaman dari sebagian elite politik dan perwira militer karena sering kali menyebabkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Sehingga pada tahun 1970-an beberapa perwira militer justru mendekati diri pada kelompok lain yang dinilai lebih profesional dalam menjalankan tugas, seperti Wakil Panglima ABRI dan Pangkobkamtib Jenderal Soemitro serta Kepala Bakin Jenderal Sutopo Juwono. Keduanya lantas dikenal sebagai kelompok Hankam yang sering berbeda pendapat dengan kelompok Aspri (Crouch, 2007).

4.1.3. Proyek TMII dan RUU Perkawinan

Proyek TMII yang digagas oleh Ibu Tien Soeharto pada akhir tahun 1972 memunculkan penolakan dari masyarakat karena proyek itu terlalu fantastis untuk pemerintah yang sedang bangkit dari masalah ekonomi. Bahkan biaya yang diperkirakan mencapai Rp. 10 Miliar dan harus sudah selesai ada tahun 1975. Hal tersebut menimbulkan keresahan masyarakat karena proyek TMII ini kurang tepat apabila dilaksanakan dalam waktu dekat. Selain karena sumber pembiayaan yang masih samar-samar dikhawatirkan proyek ini akan dimanfaatkan oleh oknum untuk tindak korupsi (Aly, 2004) Meskipun presiden sudah menegaskan bahwa proyek ini bukan proyek pemerintah, keresahan tetaplah menyebar hingga mahasiswa juga semakin gencar melakukan penolakan seperti Gerakan Penghemat dan Gerakan Penyelamat Uang Rakyat di Jakarta, Gerakan Akal Sehat di Bandung, dan gerakan penolakan lainnya di Semarang serta Yogyakarta. Semua gerakan tersebut diinisiasi oleh mahasiswa yang amat vokal menentang proyek TMII (Cahyono, 1998).

Satu lagi persoalan yang turut mewarnai kemelut politik dalam negeri pada tahun 1973 ialah terkait Rancangan Undang-Undang Perkawinan RUU itu yang menuai respons negatif dari masyarakat dikarenakan sebagian isi dalam RUU tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam yang menjadi kepercayaan sebagian besar masyarakat Indonesia (*Harian Abadi*, 12-14 November 1973). Penolakan keras muncul dari para ulama yang tidak setuju dan berusaha agar RUU tersebut ditarik kembali. Muncul pula prasangka yang dilayangkan kepada golongan Kristen bahwa mereka bertekad merealisasikan negara Pancasila yang sekuler. Ketika sidang DPR berlangsung pada 27 September 1973, lebih dari 300 mahasiswa menduduki gedung DPR dan mengacau ketika Menteri Agama Mukti Ali sedang membacakan hasil putusan pemerintah terkait RUU Perkawinan yang menjadi kontroversi (*Harian Abadi*, 5 Desember 1973).

RUU ini kemudian beberapa kali dibahas dalam rapat gabungan antara Komisi III (bidang hukum) dan Komisi IX (bidang keagamaan) DPR-R hingga dicapai kesepakatan adanya peninjauan kembali, perubahan, dan penghapusan terhadap pasal-pasal bermasalah yang memancing kontroversi. Dengan demikian RUU Perkawinan tetap dapat disahkan dan diberlakukan sesuai dengan nilai-nilai yang telah tertanam dalam kehidupan seluruh umat beragama di Indonesia.

4.1.4 Insiden Anti Cina sebagai Potret Kesenjangan Sosial

Pada tanggal 5 Agustus 1973 terjadi insiden ketidaksengajaan yang berubah menjadi sebuah huru-hara di Bandung. Pengeroyokan oleh warga keturunan Cina terhadap pribumi berakhir dengan huru-hara di kota Bandung. Massa mengamuk karena pengeroyokan tersebut hingga kemudian mencari orang-orang keturunan Cina untuk dijadikan target. Kendaraan dan rumah mereka dirusak lalu dibakar, sebagian harta benda lainnya bahkan dijarah massa. Total kerusakan yang dilaporkan berupa 1.535 rumah dan toko, 129 mobil, serta 169 kendaraan roda dua (Setiono, 2008).

Mahasiswa Bandung merilis pernyataan bahwa mereka tidak membenarkan tindakan anarkis yang terjadi dalam peristiwa ini, namun menurut mereka perlu adanya kesadaran untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran karena insiden huru-hara itu bukan hanya sebatas masalah rasial, melainkan juga merupakan salah satu bukti nyata adanya ketimpangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Terlebih lagi insiden yang mengandung unsur sara tersebut menasar kepada etnis Tionghoa yang acap kali memang memperjelas adanya kesenjangan dengan sifat-sifat keturunan mereka yang cenderung monopolistik, kapitalistik, serta bersikap eksklusif. Hal tersebut lantas dijadikan sebagai salah satu sindiran mahasiswa terhadap pemerintah yang kurang menaruh perhatian kepada persoalan semacam ini. Mahasiswa merasa

bahwa perlu adanya perbaikan terhadap sikap dan kebijakan pemerintah yang berpotensi memperparah kesenjangan sosial, salah satunya terkait program-program pembangunan yang sering kali hanya memihak dan menguntungkan sebagian golongan (Aly, 2004).

4.2. Kronologi Peristiwa Malari 1974

4.2.1 Menuju Malari

Pada bulan Oktober 1973 mahasiswa Universitas Indonesia mengadakan sebuah diskusi dengan mengundang pembicara dari angkatan 1928 hingga angkatan 1970. Hasil diskusi tersebut berupa Petisi 24 Oktober, berisi hal-hal yang selama dikhawatirkan mahasiswa, mulai dari strategi pembangunan yang hanya memihak sebagian golongan, masalah kenaikan harga dan pengangguran, serta penyimpangan-penyimpangan yang acap kali dilakukan elite pemerintahan. Diskusi serupa terus dilakukan hingga awal November 1973 dengan tema pembahasan berupa pelaksanaan program pembangunan, dominasi modal Jepang, dan evaluasi politik luar negeri Indonesia. Aksi mahasiswa mendapat momennya ketika J.P. Pronk selaku Ketua IGGI berkunjung ke Indonesia pada 11 November 1973. Sekelompok mahasiswa yang dikenal dengan Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk Indonesia (GMII) menyambut kedatangan Pronk di bandara untuk menyampaikan keresahan mereka terkait program pembangunan pemerintah. Hal yang sama juga terjadi di Yogyakarta satu minggu kemudian pada 17 November 1973 juga mendapat sambutan serupa dari 40 mahasiswa yang menamakan aksi mereka sebagai Gerakan Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (GEMIRI). Dalam kesempatan tersebut mahasiswa menyampaikan memorandum terkait strategi pembangunan yang menurut mereka mengalami kegagalan baik secara konsep maupun proses eksekusinya.

Pada tanggal 24 Desember 1973 seratus orang perwakilan Dewan Mahasiswa yang dipimpin oleh Hariman Siregar mencoba melakukan "Dialog Langsung" dengan presiden untuk meminta pertanggungjawaban beliau sebagai kepala negara, namun keinginan mahasiswa tidak terwujud karena Presiden tidak menampakkan diri (*Harian Abadi*, 26 Desember 1973; Raillon, 1985: 106). Merasa bahwa pemerintah tidak menggubris Petisi 24 Oktober, Hariman mengancam bahwa ia akan membawa massa yang lebih besar pada aksi-aksi berikutnya. Aksi mahasiswa semakin gencar terbukti dengan diadakannya tirakat di beberapa tempat pada 31 Desember 1973. Di Jakarta diadakan "Malam Keprihatinan" di Universitas Indonesia, di Yogyakarta kegiatan serupa bertajuk "Renungan Indonesia" digelar di dekat patung almarhum Jenderal Soedirman. Kegiatan itu berisi protes yang dikemas dalam kegiatan diskusi yang melibatkan mahasiswa, dosen, aktivis non kampus, hingga para seniman (Aly, 2010; Padiatra, 2015).

Awal Januari diwarnai dengan aksi pembakaran boneka yang merepresentasikan Aspri dan Tanaka selaku Perdana Menteri Jepang sebagai bentuk protes atas dominasi modal Jepang di Indonesia. Mahasiswa juga mengeluarkan Tritura baru yang berisi tiga hal, yaitu bubarkan Aspri, turunkan harga, serta berantas korupsi. Presiden Soeharto menerima delegasi sejumlah Dewan Mahasiswa pada tanggal 11 Januari 1974 di Bina Graha. Perwakilan mahasiswa berjumlah 35 orang selaku pengurus Dewan Mahasiswa se-Indonesia yang datang menyampaikan pertanyaan dan keluhan mereka atas permasalahan yang akhir-akhir ini menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat, namun dialog yang berlangsung selama 2 jam itu tidak memuaskan mahasiswa lantaran respons Presiden Soeharto tidak sesuai harapan karena lebih banyak mendengarkan ketimbang memberi keterangan, dan beliau juga tidak mengambil keputusan apapun (Raillon, 1985: 111; Agustina, 2014: 76). Hal tersebut kemudian mendorong mahasiswa untuk merencanakan sebuah aksi yang akan digelar pada saat kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Indonesia pada 14 Januari 1974

4.2.2 Kedatangan Tanaka dan Huru-Hara di Jakarta

Pada saat Tanaka di tiba di Indonesia tepat pada tanggal 14 Januari 1974, mahasiswa mencoba menyambut kedatangan Tanaka di Bandara Halim Perdanakusumah dengan aksi unjuk rasa. Namun aksi mereka berhasil diamankan oleh aparat sehingga mahasiswa gagal mendekat. Malamnya, bertempat di Universitas Indonesia, mahasiswa mengadakan evaluasi sekaligus merencanakan gerakan serentak yang akan digelar pada 15 Januari 1974. Keesokan harinya tepatnya pukul 08.00 WIB massa terdiri dari mahasiswa kampus-kampus di Jakarta berkumpul di kampus UI. Mereka akan berjalan kaki dari kampus-kampus menuju kawasan Monas dan kemudian bersama-sama melakukan aksi pusat di Universitas Trisakti. Pelajar sebagai elemen non kampus juga diperbolehkan untuk turut berpartisipasi dalam aksi 15 Januari mendatang (Daulay dan Hasibuan, 2011:

65). Namun saat aksi berlangsung aksi destruktif di beberapa titik seperti Pasar Senen, Harmoni, dan Jalan Juanda. Menjelang sore hari massa semakin tak terkendali terutama di daerah pusat perdagangan Proyek Senen dan di depan Gedung Astra tepatnya di Jalan Jenderal Soedirman daerah Blora. Massa mengeluarkan barang-barang dari dalam gedung dan membakarnya di tengah jalan. Beberapa gedung tersebut turut dibakar hingga menyisakan puing-puingnya saja.

Aksi tersebut masih berlanjut hingga 16 Januari 1974. Massa menyerbu Gedung Astra dan Pertamina, mereka membakar mobil-mobil yang berada di dalam *showroom* dan mengamuk di Kantor Besar Pertamina Unit III tak jauh dari lokasi Gedung Astra. Karyawan yang berjaga di depan kantor tak mampu menahan massa yang memaksa masuk ke dalam gedung dan merusak apapun yang mereka lihat (Arifin, 1974: 159-162; *Kedaulatan Rakyat*, 17 Januari 1974).

4.2.3 Respons Terhadap Kerusakan dan Penyelesaian Peristiwa Malari

Menurut keterangan Menhankam Jenderal Panggabean, kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa ini di antaranya ialah 11 korban jiwa dinyatakan meninggal, 17 orang luka berat, 122 orang luka ringan, 775 orang ditahan, 877 mobil dan 187 motor rusak/dibakar, 145 gedung rusak/dibakar, serta 160 kg emas/perhiasan hilang dirampok massa saat kejadian berlangsung (*Kedaulatan Rakyat*, 22 Januari 1974).

Satu hari setelah kerusakan berlangsung, mahasiswa mengeluarkan pernyataan bahwa tindakan kerusakan tersebut sangat bertentangan dan merusak citra mahasiswa. Mereka juga menyatakan keprihatinan atas terjadinya peristiwa kelam tersebut, dan menghimbau agar mahasiswa beserta seluruh masyarakat untuk tidak terpancing dan secara bersama-sama memelihara ketertiban.

Pemerintah meyakini bahwa orang-orang PSI dan Masyumi adalah dalang di balik Peristiwa Malari 1974. Tuduhan tersebut didasarkan pada perilaku menyimpang yang tercermin dalam peristiwa pembakaran, pengrusakan, hingga terjadinya huru-hara. Perilaku tersebut dinilai identik dengan orang-orang PSI dan Masyumi yang sejak dahulu menggunakan cara radikal untuk mewujudkan cita-citanya, yakni mendirikan negara sosialis penganut demokrasi liberal. Gerakan mereka sama bahayanya dengan gerakan PKI karena tujuan yang mereka inginkan diraih dengan cara yang ekstrim-radikal dan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga mereka harus ditindak tegas dan sudah sepantasnya bertanggung jawab. Jaksa Agung juga menyatakan bahwa Peristiwa Malari 1974 jelas ditunggangi oleh orang-orang tertentu yang memanfaatkan situasi dan gerakan mahasiswa untuk menciptakan situasi yang tidak aman dan menjatuhkan Presiden Soeharto. Ali Moertopo pun menegaskan bahwa Peristiwa Malari merupakan perbuatan subversif yang mengarah kepada makar (Arifin, 1974).

Berikutnya penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat tragedi Malari gencar dilakukan. Nama Hariman Siregar selaku Ketua DMUI menjadi terdakwa utama karena digadang-gadang menjadi tokoh sentral di balik gerakan mahasiswa pada peristiwa tersebut. Total jumlah orang yang ditangkap setelah meletusnya Peristiwa Malari mencapai 775 orang dan sebagian besar dibawa ke Rumah Tahanan Militer Boedi Oetomo (Lasut, 2011: 233). Dari sekian banyak jumlah orang yang ditangkap dan ditahan, hanya tiga orang yang diadili melalui persidangan. Hariman Siregar, Sjahrir, dan Mohammad Aini Chalid. Ketiganya adalah tokoh mahasiswa yang didakwa atas tuduhan subversif yang mengarah pada tindakan makar (Daulay dan Hasibuan, 2011: 71-85; Lasut, 2011: 159-160).

4.3 Dampak Peristiwa Malari Terhadap Gerakan Mahasiswa

Untuk mencegah peristiwa serupa terulang kembali, pemerintah mulai membatasi aktivitas mahasiswa khususnya yang berkaitan dengan hal-hal sifatnya politis. Diawali dengan lahirnya SK Mendikbud No. 028/U/1974 yang berisi tentang Petunjuk-Petunjuk Kebijakan dalam rangka Pembinaan Kehidupan

Kampus Perguruan Tinggi (Aly, 2004: 399). Pemerintah berusaha mengawasi kegiatan kampus mahasiswa melalui birokrasi perguruan tinggi. Munculnya kebijakan ini menjadi awal mula ketatnya kontrol pemerintah orde baru terhadap gerakan mahasiswa terutama dalam ranah politik. Hal ini kemudian turut berdampak pada gerakan mahasiswa yang mengalami perubahan signifikan selama beberapa tahun hingga orde baru berakhir. Perubahan tersebut nampak dalam beberapa periode yang memperlihatkan perbedaan gerakan mahasiswa dalam berbagai aspek.

4.3.1 Gerakan Mahasiswa 1974-1978

Lahirnya SK Mendikbud No. 028/U/1974 yang berisi tentang Petunjuk-Petunjuk Kebijaksanaan dalam rangka Pembinaan Kehidupan Kampus Perguruan Tinggi berhasil mempersempit gerakan mahasiswa. Terbukti dengan beralihnya gerakan mahasiswa yang dimungkinkan dilakukan melalui diskusi hingga menghasilkan sebuah bumerang bagi pemerintah melalui gerakan mahasiswa Bandung pada tahun 1977/1978. Pertengahan bulan Januari 1978 mahasiswa Bandung menggelar aksi di kampus ITB dan menerbitkan sebuah buku dengan tajuk Buku Putih Perjuangan Mahasiswa. Buku setebal 41 halaman tersebut memuat tentang kritik terhadap pemerintah berdasarkan pada hasil analisa data dan fakta di lapangan yang menunjukkan kegagalan pemerintah orde baru, terutama dalam hal strategi pembangunan. Dalam buku tersebut juga termuat pernyataan sikap mahasiswa ITB terkait situasi dan kondisi dalam negeri yang mengalami gejolak selama beberapa tahun terakhir dan semakin memanas seiring dengan adanya pemilu tahun 1977. Buntut dari peristiwa ini Dewan Mahasiswa di seluruh perguruan tinggi dibekukan pemerintah.

Berikutnya sebagai tindak lanjut atas peristiwa ini sekaligus sebagai peraturan lanjutan dari SK Mendikbud No. 028/U/1974, pemerintah melalui Mendikbud Daoed Joesoef mengeluarkan SK Mendikbud No. 0156/U/78 pada 19 April 1978 yang mengatur tentang Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Lahirnya kebijakan ini tidak hanya menjadi pukulan telak bagi mahasiswa yang semakin sulit untuk melancarkan gerakan mereka, melainkan juga pada pejabat di lingkungan kampus yang dihadapkan dengan dua posisi berlawanan. Pemerintah juga tak pandang bulu dalam menindak pelanggar kebijakan ini, karena siapapun baik mahasiswa maupun *civitas academica* lain yang terbukti melakukan pelanggaran terkait kebijakan ini akan dikenakan sanksi tegas (Maiwan, 2014: 25).

4.3.2 Gerakan Mahasiswa 1980-an

Masa diberlakukannya kebijakan NKK/BKK oleh pemerintah orde baru menjadi masa paling kelam bagi sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia, sebab selama hampir satu dekade gerakan mahasiswa dibungkam oleh rezim pemerintahan. Meskipun mahasiswa berada di bawah belenggu kebijakan rezim orde baru, mereka masih berusaha untuk bertahan dengan berbagai cara, salah satunya ialah dengan memelihara kesadaran berpolitik melalui kelompok studi yang berfungsi sebagai wadah untuk bertukar pemikiran kritis antar anggotanya. (Ali, 1990: 31-32). Kemunculan kelompok studi yang berbasis pada kegiatan intelektual dan teoritis itu kemudian disusul oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mahasiswa yang lebih mengutamakan kerja praktis dengan menyentuh kepentingan sosial yang lebih nyata (*Bali Post*, 11 Juli 1991). Mahasiswa juga memiliki alternatif lain dengan jalur menghidupkan pers mahasiswa yang sempat meredup, namun kegiatan pers saja dirasa tidak efektif untuk mewujudkan kontrol sosial, sehingga perlu adanya tindakan lebih lanjut dengan melakukan perlawanan terhadap penguasa.

Akhirnya pada tahun 1989 gerakan mahasiswa yang identik dengan aksi protes dan demonstrasi kembali gencar dilakukan meskipun bersifat sporadis dan isu yang diangkat sebatas isu lokal karena mempertimbangkan kondisi struktural sistem politik orde baru yang amat represif menyebabkan mahasiswa belum memiliki kesanggupan untuk menyentuh masalah-masalah sensitif serta memiliki beban politik berat seperti isu nasional (Culla, 1999: 130-132). Contohnya seperti lahirnya Kelompok Solidaritas Korban Pembangunan Kedungombo sebagai komite aksi atas kasus pembangunan Waduk Kedungombo di Jawa Tengah yang sempat menjadi isu hangat pada akhir 1980-an (Ali, 1990: 108; Supriyanto, 1998: 16).

4.3.3 Gerakan Mahasiswa 1990-an

Bangkitnya gerakan mahasiswa secara perlahan setelah sekian lama melemah karena birokrasi semakin menemui titik terang tatkala Mendikbud Fuad Hassan mengeluarkan SK No. 457/U/1990 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK). Dalam SK tersebut memuat aturan terkait organisasi intra kampus yang diperbolehkan, yaitu Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) yang terdiri atas Senat Mahasiswa Fakultas dan Unit Kegiatan Mahasiswa. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi mahasiswa karena mahasiswa kembali memiliki organisasi sebagai wadah untuk bersatu membangun basis gerakan. semenjak SMPT mulai diberlakukan, mahasiswa memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan konsolidasi meskipun masih dibayangi oleh kontrol birokrasi.

Berikutnya mahasiswa semakin aktif dalam melakukan aksi protes yang secara garis besar terfokus pada

dua kategori isu. Pertama, penegakan HAM dan upaya demokratisasi yang umumnya berkaitan dengan tuntutan perubahan politik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dengan hukum yang adil. Kedua, ialah isu tentang tanah, lingkungan, dan perburuhan sebagai upaya untuk membantu masyarakat kelas bawah seperti masyarakat pinggiran kota dan petani desa yang rentan menjadi korban program pembangunan. meskipun mampu menjadi organisasi yang mewadahi kegiatan mahasiswa di dalam kampus, namun dalam pelaksanaannya SMPT gagal menjadi organisasi mahasiswa yang mandiri dan bebas dari campur tangan birokrasi. Oleh karena itu mahasiswa mencari alternatif lain dengan kembali menghidupkan Dewan Mahasiswa selaku organisasi intra kampus yang independen.

Gerakan mahasiswa kembali muncul ke permukaan saat situasi dan kondisi dalam negeri menunjukkan adanya krisis multidimensional. Semenjak terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Mahasiswa semakin gencar melakukan unjuk rasa dengan dukungan masyarakat dan oposisi pemerintah. Tuntutan reformasi politik semakin merebak pada akhirnya benar-benar terwujud pada 21 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto menyatakan undur diri setelah 32 tahun melanggengkan kekuasaannya (Rudianto, 2010: 167). Berakhirnya kekuasaan orde baru dengan sistem politiknya yang cenderung otoriter menjadi kelegaan tersendiri terutama bagi keberlangsungan gerakan mahasiswa, karena bersamaan dengan itu berakhir pula pembatasan-pembatasan terhadap aktivitas mahasiswa terutama terkait gerakan mereka yang mengarah kepada ranah politik.

5. KESIMPULAN

Peristiwa Malari 1974 terjadi karena eskalasi permasalahan yang menyebabkan gejolak politik dalam negeri pada awal 1970-an, di antaranya ialah dominasi modal asing terutama dari Jepang, dualisme lembaga negara dan perpecahan internal, ide pembangunan TMII dan kisruh RUU Perkawinan, serta potret kesenjangan sosial dalam insiden Anti Cina di Bandung pada pertengahan 1973. Gejolak dalam negeri itu memancing kritik mahasiswa terhadap pemerintah melalui diskusi dan demonstrasi yang semakin gencar dilakukan dan mencapai puncaknya saat kedatangan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia. Aksi mahasiswa berujung pada kerusuhan karena adanya keterlibatan oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu, sehingga mahasiswa menjadi pihak yang paling dirugikan karena harus menanggung perbuatan yang tidak mereka lakukan. Dampak dari peristiwa ini paling dirasakan oleh mahasiswa sebagai pelaku gerakan di awal peristiwa. Untuk menghindari terjadinya peristiwa serupa, pemerintah mengeluarkan sederet kebijakan yang membatasi gerakan mahasiswa. Singkatnya, mahasiswa dilarang untuk terjun dalam politik praktis seperti mengkritik pemerintah melalui aksi yang berpotensi mengganggu stabilitas politik. Keluarnya kebijakan-kebijakan itu dilakukan secara bertahap dan secara tidak langsung turut mengubah gerakan mahasiswa selama beberapa tahun setelahnya. Situasi itu bertahan hingga 1998 dan berakhir bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan orde baru di tangan Presiden Soeharto.

DAFTAR PUSTAKA

Harian Abadi, 12-14 November 1973

Harian Abadi, 5 Desember 1973

Harian Abadi, 26 Desember 1973

Kedaulatan Rakyat, 17 Januari 1974

Kedaulatan Rakyat, 22 Januari 1974

Bali Post, 11 Juli 1991

Arifin, M. (1974). *Fakta, Analisa Lengkap, dan Latar Belakang Peristiwa 15 Januari 1974*. Jakarta: Publishing House Indonesia

Agustina, W. dkk. (2014). *Massa misterius Malari: rusuh politik pertama dalam sejarah Orde Baru*. Jakarta: Tempo Publishing.

Ali, D. J. (1990). *Gerakan Mahasiswa dan Politik Kaum Muda Era 80-an*. Jakarta: Miswar.

Altbach, P. G. (1988). *Politik dan mahasiswa: Perspektif dan kecenderungan masa kini*. Jakarta: Gramedia bekerja sama dengan Yayasan API.

Aly, R. (2004). *Menyilang jalan kekuasaan militer otoriter: gerakan kritis mahasiswa Bandung di panggung politik Indonesia, 1970-1974*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Burstein, P., Einwohner, R. L., & Hollander, J. A. (1995). *The success of political movements: A bargaining*

- perspective. The politics of social protest: Comparative perspectives on states and social movements, 3, 381.
- Cahyono, H. (1998). *Jenderal Soemitro dan Peristiwa Malari '74*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Cohen, B. J. (1992). *Sociology an Introduction*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Crouch, H. (2008). *The Army and Politics in Indonesia*. Equinox Publishing.
- Culla, A. S. (1999). *Patah Tumbuh Hilang berganti: sketsa pergolakan mahasiswa dalam politik sejarah Indonesia, 1908-1998*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Daulay, A. H. & Hasibuan, I. (2011). *Hariman dan Malari : Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing*. Jakarta : Q. Communication.
- Easton, D. (1957). An Approach to the Analysis of Political Systems. *World Politics*, 9(3), 383–400.
- Easton, D. (1984). *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*. Jakarta: Bina Aksara
- Harthanti, D., & Nuryana, N. (2018). Pengaruh IMF Dalam Pengambilan Kebijakan Ekonomi-Politik Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Baru (1967-1974). *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 3(1), 21-29.
- Husin, L. H. (2014). *Gerakan Mahasiswa Sebagai Kelompok Penekan*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Johnston, H. (2014). *What is a social movement?*. John Wiley & Sons.
- Kusumah, I. (2007). *Risalah Pergerakan Mahasiswa*. Bandung: Indydec Press.
- Lasut, J. (2011) *Melawan Soeharto dan Barisan Jenderal Orba*. Jakarta: Yayasan Penghayat Keadilan.
- Maiwan, M. (2014). Gerakan Mahasiswa Di Indonesia Dalam Bingkai Kekuasaan Orde Baru (1966-1998). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 14(1), 15-32.
- Martadinata, A. M. (2019). *Peran mahasiswa dalam pembangunan di Indonesia*. Idea, 2655(7258), 2655-3139.
- Mirsel, R., & Amustofa. (2004). *Teori Pergerakan Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.
- Padiatra, A. M. (2015). *Introduction To Malari: dari Situasi, Aksi, Hingga Rusuh pada Awal Orde Baru 1970- 1974*. Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, 4(2).
- Raillon, F., Tamara, N., & Simanjuntak, E. S. (1985). *Politik dan ideologi mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Rizki, M. (2013). Investasi Asing Jepang di Indonesia Masa Orde Baru Tahun 1967-1974. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 1(2)
- Rudianto, D. (2010). *Gerakan Mahasiswa Dalam Perspektif Perubahan Politik Nasional*. Jakarta: Golden Terayun Press.
- Rustamana, A. Antarik, M. J. F., & Liana H. (2023). Pengaruh Peristiwa Malari Terhadap Kemunduran Pers Mahasiswa. *Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya*, 2(2), 93-113
- Sanit, A. (1981). *Sistem Politik Indonesia: suatu studi mengenai penghampiran dan beberapa aspek lingkungan sistem politik*. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Siregar, H. (2003). *Gerakan Mahasiswa: Pilar ke-5 Demokrasi*. Jakarta: Teplok Press.
- Supriyanto, D. (1998). *Pers Mahasiswa Protes Sepanjang NKK/BKK*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Susanti, E. Penanaman Modal Asing Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional Pada Masa Orde Baru Tahun 1967-1981. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 2016, 4.3.
- Tarrow, S. (2011). *Power in movement*. Cambridge university press.
- Wirajati, Y. (2018). Mahasiswa dan Malari di Jakarta: Telaah Perilaku Kolektif Mahasiswa Indonesia 1973-1974. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 13(2) .